

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya untuk melaksanakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada sebuah konsep otonomi daerah yaitu pembagian kekuasaan per daerah baik tingkat provinsi maupun ke tingkat yang lebih bawah yaitu tingkat kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sistem pemerintahan yang awalnya terpusat di pemerintahan pusat kemudian di desentralisasi dimana desentralisasi itu sendiri merupakan sebuah wewenang dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Demi menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang baik diperlukan sebuah pembangunan daerah dan sumber daya. Untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik atau maksimal dalam upaya untuk melakukan pembangunan daerah, diperlukan pembangunan dalam berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, juga sumber daya dalam bidang perekonomian. Apabila pembangunan dalam beberapa aspek

tersebut berhasil, maka capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa maksimal.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004, menandakan jika kebutuhan pendanaan suatu wilayah bisa didapat lebih banyak dari subsidi ataupun dorongan dari pusat, serta donasi Pemasukan Asli Wilayah terhadap kebutuhan yang itu sangat kecil, hingga ditentukan kalau kinerja keuangan wilayah kan kalau kinerja keuangan wilayah itu masih lemah. Dalam Prinsipnya, apabila PAD terus menjadi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa menampilkan kalau saat ini presentasi wilayah bergantung pada pusat terus menjadi kecil

Setiap daerah pasti mempunyai Pendapatan Asli Daerah nya masing-masing, contohnya adalah Kota Bandung yang merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi. Dan salah satu sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung adalah retribusi daerah.

Menurut Mahmudi (2010) mengungkapkan manajemen pemasukan pendapatan daerah ditinjau dari pemetaan upaya yang dilakukan daerah untuk mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah yakni upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan pemasukan sumber keuangan secara resmi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat melakukan tugas pemerintahan serta pembangunan tetap membutuhkan sumber penerimaan

yang bisa diandalkan. Kebutuhan ini terus dirasakan oleh daerah sangat utama sejak diberlakukannya system otonomi daerah di Indonesia, yakni mulai bersamaan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan terdapatnya otonomi, sesuatu wilayah lebih dipacu buat bias melaksanakan bermacam kreasi buat mencari sumber pemasukan wilayah yang bisa menolong pembiayaan di sesuatu wilayah. Dari bermacam sumber penerimaan alternatif yang bisa dipungut oleh wilayah, Undang- Undang tentang pemerintahan wilayah sudah menetapkan pajak serta retribusi wilayah selaku salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam wilayah serta bisa di besar kecilkan cocok dengan keadaan yang terdapat di wilayah tersebut.

Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah yang terdiri dari 2 sumber, yaitu:

- a. Pendapatan Daerah
- b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari

- 1) Pendapatan Asli Daerah,
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapat Ahmad (2009) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapat yang diperoleh daerah yang ditarik berdasarkan perda yang disesuaikan dengan konstitusi untuk mengatur pemerintahan daerah, hal ini ditentukan oleh kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, juga atas dasar potensi yang dimiliki suatu

daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya, dimana disesuaikan dengan data kependudukan, luasnya wilayah, dan pertimbangan lainnya untuk menyelenggarakan dan memiliki otonomi daerah tersendiri.

Pemungutan pajak serta retribusi wilayah sudah diatur dalam Undang- Undang No 18 Tahun 1997 serta disempurnakan oleh Undang- Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak wilayah serta retribusi wilayah. Dalam upaya tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah bersumber pada Undang- Undang No 34 Tahun 2000 serta ditukar jadi Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah, buat tingkatkan pemasukan asli wilayah, terdapat 3 perihal yang butuh dibenahi ataupun diperbaiki ialah system pemungutan pajak serta retribusi wilayah wajib lebih disempurnakan, kewenangan yang diberikan pada kepala wilayah di bidang perpajakan wajib lebih besar, serta kenaikan daya guna pengawasan. Perihal tersebut berjalan beriringan sehingga upaya yang dicoba buat tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah bisa dicoba secara tidak berubah- ubah cocok dengan syarat yang berlaku. Tidak hanya itu pula, wajib terdapat sanksi yang diberikan apabila pada penerapannya terjalin pelanggaran.

Salah satu sumber pemasukan sesuatu wilayah merupakan pemasukan yang berasal dari Tubuh Usaha Kepunyaan Wilayah, Tetapi seluruh pemasukan wilayah yang berasal dari ekonomi asli wilayah serta salah satu sumber Pemasukan Asli Wilayah yang dapat dibilamh mempunyai hasil yang besar merupakan pajak wilayah serta retribusi wilayah. Pajak serta retribusi wilayah merupakan salah satu wujud

kedudukan dari warga buat turut menolong melakukan penyelenggaraan otonomi wilayah. Pajak serta retribusi wilayah ialah elemen berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan wilayah.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan juga merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana layaknya kota metropolitan, Kota Bandung sangat padat dan ramai oleh banyak pendatang dari luar kota yang ingin mencari peruntungan maupun melanjutkan pendidikannya. Biasanya para pendatang menggunakan transportasi umum seperti Bis, Elf, Travel dan sebagainya.

Terminal-Terminal tersebut setiap harinya menerima kedatangan angkutan dari luar maupun dalam kota. Angkutan tersebut setiap akan memasuki terminal biasanya harus membayar uang masuk atau yang biasa disebut dengan retribusi. Berikut ini adalah data dan tipe terminal yang ada di Kota Bandung diantaranya:

Tabel 1.1

Nama dan Tipe Terminal di Kota Bandung

No	Nama Terminal	Alamat	Tipe
1	Terminal Leuwipanjang	Jl. Soekarno Hatta	A
2	Terminal Cicaheum	Jl. Ahmad Yani	A
3	Terminal Non Bus Leuwipanjang	Jl. Soekarno Hatta	B
4	Terminal Non Bus Cicaheum	Jl. Ahmad Yani	B

5	Terminal Non Bus Abdul Muis	Jl. Pungkur	B
6	Sub Terminal Ledeng	Jl. Setiabudhi	B
7	Sub Terminal Ciroyom	Jl. Ciroyom	B
8	Sub Terminal ST. Hall	Jl. Suniaraja	B
9	Sub Terminal Dago	Jl. Ir. H. Juanda	B
10	Sub Terminal Ujungberung	Jl. Ujungberung	B
11	Pangkalan I Tegalega	Jl. Otista	C
12	Pangkalan II Sederhana	Pasar Sederhana	C
13	Pangkalan III Sadang Serang	Jl. Sadang Serang	C
14	Pangkalan IV Elang	Jl. Elang	C
15	Pangkalan V Buah Batu	Pasar Ciwastra	C
16	Pangkalan VI Antapani	Jl. Cibatu	C
17	Pangkalan VII Cibaduyut	Jl. Cibaduyut	C
18	Pangkalan VII Gedebage	Pasar Gedebage	C

Sumber: Data Bandung.Id (Di olah Oleh Penulis)

Data diatas merupakan data terminal-terminal yang ada di Kota Bandung serta alamat dan tipe terminal itu sendiri dimana terminal tipe A merupakan terminal yang melayani angkutan bus baik jarak dekat maupun antar kota antar provinsi (AKAP). Lalu terminal tipe B berlokasi dalam jaringan trayek AKDP. Lantas untuk terminal tipe C terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan dalam jaringan trayek angkutan dalam kota dan/atau pedesaan.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal di Kota Bandung

Tahun 2021

No	Nama Terminal	Target Per Tahun	Realisasi	%
1	Terminal Bis Cicaheum	263.746.000	177.281.500	68%
2	Terminal Non Bis Cicaheum	98.809.000	54.493.500	55%
3	Sub Terminal Abdul Muis	25.844.000	16.003.000	62%
4	Sub Terminal Ciroyom	28.350.000	20.731.500	73%
5	Sub Terminal ST Hall	29.960.000	22.650.500	76%
6	Sub Terminal Ledeng	19.362.000	14.300.000	74%
7	Sub Terminal Dago	15.036.000	10.802.000	72%
8	Sub Terminal Ujung Berung	10.689.000	7.684.500	72%
9	Sub Tegallega	30.016.000	20.269.000	68%
10	Pangkalan I Sederhana	8.442.000	5.318.000	63%
11	Pangkalan II Sadangserang	12.348.000	8.929.500	72%
12	Pangkalan III Elang	47.376.000	26.083.500	55%
13	Pangkalan IV Buah Batu	8.316.600	5.575.500	67%
14	Pangkalan V Antapani	7.413.000	5.170.500	70%
15	Pangkalan VI Cibaduyut	7.266.000	4.930.500	68%
16	Pangkalan VII Gedebage	7.140.000	4.909.500	69%
Retribusi Terminal		620.113.600	406.132.500	65%
Retribusi Lahan MCK		78.666.000	56.037.000	71%
Retribusi Kios/Lahan		578.438.000	218.933.200	38%

Jumlah Total	1.277.217.600	681.102.700	53%
---------------------	----------------------	--------------------	------------

Sumber: UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung

Data diatas merupakan data target dan realisasi pemasukan retribusi terminal dari terminal dan pangkalan yang ada di Kota Bandung Tahun 2021 yang dimana rata-rata realisasi dari pemasukan retribusi angkutan sebesar 60%-70% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya dan pemasukan paling sedikit didapat dari retribusi kios dan lahan yang hanya 38% dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1.3

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Bandung UPT Terminal
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Presentase
2019	Rp. 5.305.667.341	Rp. 2.052.726.000	38,68%
2020	Rp. 1.212.960.000	Rp. 551.643.700	45.47%
2021	Rp. 1.277.217.600	Rp. 681.102.700	53.33%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berikut ini merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2019-2021 yang dimana dibandingkan dengan tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan minat dari masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan juga penjualan pedagang kios di terminal.

Dari analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa UPT Terminal Kota Bandung telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam menciptakan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Strategi kemitraan dengan pelaku usaha, peningkatan kapasitas area terminal, dan efisiensi dalam penyelenggaraan menjadi bukti nyata komitmen dalam mencari peluang pendapatan baru. Konsep teori keuangan daerah dari Mamesah memberikan kerangka kerja yang kokoh, memandu perencanaan dan pelaksanaan strategi secara sistematis.

Namun, tantangan tetap ada. Kompleksitas regulasi dan persaingan dari sektor transportasi lainnya menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam strategi. Keandalan pelayanan publik, baik dalam penyelenggaraan maupun pelayanan langsung kepada pengguna terminal, menjadi aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan minat pengguna.

Dalam konteks hak dan kewajiban, pembayaran pajak dan layanan berkualitas harus dijamin sebagai hak masyarakat, sementara tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterhubungan antara tujuan, perencanaan, dan penyelenggaraan menjadi landasan yang kuat untuk strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, UPT Terminal Kota Bandung telah berhasil menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerapan strategi yang kokoh. Dengan pendekatan teori keuangan daerah dari Mamesah, potensi pertumbuhan pendapatan telah ditemukan dan

dimanfaatkan dengan baik. Namun, kontinuitas dalam peningkatan layanan publik dan adaptasi terhadap dinamika eksternal tetap menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Dengan demikian, peningkatan PAD melalui UPT Terminal Kota Bandung bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian integral dari perjalanan menuju kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2021 yang diperoleh dari pendapatan UPT terminal masih belum sesuai
2. Capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang diperoleh dari pendapatan UPT Terminal cenderung menurun setelah terjadinya pandemic
3. Rendahnya peran serta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang diperoleh dari pendapatan UPT Terminal

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang diterima dari pendapatan UPT Terminal.

2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang diperoleh dari UPT Terminal Kembali seperti sebelum terjadinya pandemi.
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan UPT Terminal Kota Bandung dan bagaimana hal ini mempengaruhi implementasi strategi peningkatan pendapatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung yang diterima dari pendapatan UPT terminal.
2. Untuk mencari tahu strategi yang bias digunakan untuk meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang diperoleh dari Pendapatan UPT Terminal Kota Bandung kembali seperi sebelum terjadinya pandemic.
3. Untuk menggali dan memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan dari terminal serta merancang langkah-langkah konkret yang dapat diambil guna meningkatkan pendapatan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memperbanyak referensi pengetahuan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dan juga pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik dan ilmu keuangan khususnya mengenai mekanisme untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang di dapat dari tarif UPT terminal Kota Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan juga pengetahuan bagi penulis dalam melanjutkan penelitian atau pun melakukan penelitian baru yang berkaitan dengan ini

b. Pengambilan Keputusan

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi suatu acuan baru untuk berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Bandung khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Bandung hingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga sebagai referensi baru dalam rangka pengoptimalisasian dan juga peningkatan pendapatan tarif terminal

1.6 Kerangka Pemikiran

Rosenboom (2005) Menunjukkan bahwa Administrasi Publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Adapun dimensi yang terdapat dalam administrasi publik diantaranya:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah pemanfaatan strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan Publik memiliki

prinsip-prinsip seperti tahapan kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan.

2. Organisasi

Teori organisasi selalu mengalami pergeseran paradigma. Paradigma pertama adalah merancang organisasi untuk mencapai efisiensi dengan sistem otoritas dan mengutamakan spesialisasi, sentralisasi dan formalitas. Paradigma kedua menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan ingin bekerja dalam suasana yang menyenangkan. Jadi, peran kebutuhan sosial dan kondisi kerja penting dalam bekerja. Paradigma ketiga memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari saling ketergantungan dengan lingkungan, keterbukaan terhadap lingkungan, seluruh bagian lingkungan, rasionalitas dan objektivitas, serta kelompok kerja yang kohesif. organisasi sebagai "sistem mekanik" dan "sistem organik". Paradigma keempat berpendapat bahwa organisasi harus membentuk pasangan unit kerja (mengembangkan jaringan dengan organisasi lain).

3. Manajemen

Dimensi manajemen berkaitan dengan bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip manajemen. Manajemen itu sendiri adalah suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain. Sedangkan manajemen industri berarti manajemen instansi pemerintah.

4. Moral dan Etika

Etika adalah kebiasaan, moral, dan karakter. Ada empat aliran utama etika, yaitu Teori Empiris yang menganggap etika berasal dari pengalaman manusia, Teori Rasional yang mengatakan bahwa baik/buruk tergantung pada akal, Teori Intuisi yang berpendapat bahwa manusia secara alami memiliki pemahaman tentang baik/buruk, dan Relevansi Teori dimana anggapan bahwa benar/salah menurut Tuhan.

5. Akuntabilitas Kerja

Untuk menentukan tercapainya tujuan dalam organisasi dapat dilihat melalui akuntabilitas kerja yang berkaitan dengan dimensi kinerja. Akuntabilitas adalah kondisi dimana seseorang yang menggunakan kekuasaan dapat dibatasi oleh eksternal dan norma internal. Dalam penilaian kinerja terdapat dua paradigma, yaitu paradigma manajemen (aliran manajemen klasik, aliran manajemen hubungan manusia, aliran manajemen sumber daya manusia) dan paradigma baru manajemen

Menurut Mamesah (2018) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bila suatu daerah memiliki pendapatan rendah maka kecil kemungkinannya perwujudan kesejahteraan bisa terjalin cepat. Soal tinggi dan rendah; besar dan kecilnya pendapatan daerah tidak selamanya bergantung pada kandungan potensi suatu daerah, tetapi lebih disebabkan

beberapa faktor internal yaitu kecerdasan, kejujuran dan keuletan pengelolah manajemen daerah. Ada 3 dimensi dari keuangan daerah diantaranya:

- 1) Adanya dimensi hak dan kewajiban
- 2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
- 3) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public

Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

